

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam dua dekade pertama abad ke-XXI, kajian mengenai *resilience* (ketahanan) mengemuka dalam ragam kajian lintas disiplin yang merentang dari ekologi hingga ilmu sosial.¹ Di Indonesia sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai *ketahanan nasional* kembali mengemuka, terutama dalam konteks stabilitas politik dan identitas kebangsaan. Namun, terdapat perbedaan epistemologis yang mencolok: jika *resilience* berkembang dalam kerangka ilmiah sebagai konsep sistemik yang berusaha untuk diuji dalam pemodelan kompleks-jamak, *nasionalisme* dan *ketahanan nasional* di Indonesia cenderung beroperasi dalam koridor moral-ideologis yang tidak selalu terbuka terhadap kritik atau pembuktian ilmiah.² Di titik inilah motivasi dasar penelitian ini menetapkan pendiriannya: sebagai upaya untuk memahami ulang problematika ‘kebaikan bersama’ (*common good/bonum commune*) dan proyek emansipasi manusia dalam demokrasi kontemporer yang kerap disandingkan dengan problem *resilience* dalam ruang publik melalui lensa filsafat ilmu.

¹ S. Wiig and B. Fahlbruch, *Exploring Resilience: A Scientific Journey from Practice to Theory*, Springer International Publishing, 2019, hal. 5.

² Bdk. D. Erdianto and K. Erdianto, "Prabowo: Anggaran Pertahanan Indonesia Masih Terendah di Asia," Kompas.com, Sep. 25, 2024, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/25/18232011/prabowo-anggaran-pertahanan-indonesia-masih-terendah-di-asia>., diakses pada 27 Mei 2025, pukul 17:53 WIB.

Salah satu problem sentral dalam filsafat ilmu adalah problem demarkasi antara yang ilmiah dan non-ilmiah.³ Sekilas, persoalan ini tampak kurang bersesuaian dengan apa yang penulis ketengahkan tentang ketahanan dan emansipasi. Di titik ini-lah justru filsafat ilmu Bhaskar menunjukan relevansinya. Bhaskar melalui penyelidikan transendental menawarkan langkah sekali dayung untuk memahami duduk perkara yang sekilas tidak sebangun itu. Dalam rantai argumen transendentalnya, Bhaskar mengurai apa yang ilmiah dan non ilmiah (dalam konteks metakritik disebut ideologi) sekaligus menjembatani yang ilmiah dengan persoalan nilai, khususnya emansipasi dan kebaikan bersama. Dalam filsafat ilmunya, kritik atas non-ilmiah atau ideologi tidak berhenti pada penyimpulan deskriptif semata. Ia melanjutkan analisis sampai pada bagaimana suatu ideologi meski salah tetap bertahan dalam struktur sosial keilmuan. Ringkasnya, bagi Bhaskar yang ilmiah memiliki implikasi emansipatoris dan sekaligus dapat menjelaskan mengapa yang ideologis tetap bertahan. Oleh karena daya penjelasan dan cakupan jelajahnya, penulis hendak menggali potensi dari metakritik Bhaskar dalam kajian kebaikan bersama dan *ketahanan-ilmiah* dalam konteks demokrasi dimuka.

Problem demokrasi kontemporer dapat dipetakan dalam kerangka dua sumbu Kartesius yang melatari lanskap diskursus dalam demokrasi kontemporer. Pertama, sumbu horizontal, yakni kesenjangan antara komunitas ilmiah dan publik awam

³ Hansson, Sven Ove, "Science and Pseudo-Science", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), diakses dari: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/pseudo-science/>, diakses pada 2 Juli 2025 pukul 18:06 WIB.

sebagaimana dikaji oleh Mark B. Brown dalam *Science and Democracy*, serta dalam konteks Indonesia, ketegangan antara warga sipil dan militer sebagaimana dicatat oleh Daoed Yoesoef dalam refleksi tentang ketahanan nasional. Kedua, sumbu vertikal, yaitu rentang hierarkis antara berbagai tingkat abstraksi pengetahuan—dari metafisika, etika, hingga sains terapan—yang menunjukkan bahwa pluralisme epistemik juga bersifat skalar dan sarat komitmen epistemologis dan ontologis. Sumbu vertikal akan penulis urai dalam problem filsafat ilmu kontemporer antara positivisme logis dan konstruktivisme sosial. Kedua sumbu bermuara pada satu fenomena global yakni *post-truth*, di mana fragmentasi otoritas kebenaran memperuncing disintegrasi wacana kebaikan bersama dan emansipasi kolektif.

Sumbu horizontal dapat ditemukan dalam ketegangan daalam *Science in Democracy* karya Mark B. Brown. Ia membahas perdebatan antara komunitas ilmiah dan komunitas yang non-ilmiah dalam demokrasi. Politik berkenaan dengan representasi segala hal yang berada dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai yang dihidupi masyarakat, sedangkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan representasi fakta ilmiah. Di antara keduanya, tidak ditemukan kesinambungan.⁴ Artinya, tidak ada kemungkinan bagi keberlangsungan diskursus antara pernyataan berbasis ilmu pengetahuan dan pernyataan berbasis nilai kemanusiaan, atau diskursus antara ilmu

⁴ Kedua, berkaitan dengan jurang antara putusan imperatif dan putusan deskriptif. Sejak Hume, pernyataan fakta (*fact statement*) dan pernyataan nilai (*value statement*) tidak dapat disejajarkan. Nilai mewakili ‘apa yang seharusnya’ dan karenanya bersifat universal, sedangkan fakta mewakili ‘yang adalah’ dan karenanya bersifat partikular. Peralihan dari fakta ke nilai, atau dari partikular menuju universal, dianggap tidak memenuhi kaidah penalaran yang logis. (Bdk. Martin Suryajaya, *Mencari Marxisme: Kumpulan Esai*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016, hal. 96).

pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, dalam kerangka pikir modern dalam demokrasi.⁵

Contoh paling konkret dalam perdebatan tersebut adalah politisasi ilmu pengetahuan dalam berbagai kasus seperti perubahan iklim, vaksinasi, dan pandemi COVID-19. Laporan Johns Hopkins pada Oktober 2019, misalnya, menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang paling siap menghadapi pandemi. Namun, pada September 2020, AS menyumbang lebih dari 20% dari semua kematian akibat COVID-19. Salah satu penyebab utama kekacauan ini adalah politisasi ilmu pengetahuan dan misinformasi. Pernyataan keliru dari Presiden Trump saat itu turut menyebarkan misinformasi sehingga memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan mendukung gerakan anti-vaksin.⁶ Akibatnya, muncullah suatu istilah yang disebut ‘politisasi ilmu pengetahuan’ sebagai perlawanan terhadap praktik ilmu pengetahuan yang didorong oleh kepentingan politik (nilai personal) segelintir kelompok, atau yang pada akhirnya dianggap mengabaikan ‘nilai-nilai kemanusiaan’.

Kesadaran atas praktik ilmiah yang dipolitisir dan selalu sarat-nilai mendorong berbagai kritik atas praktik ilmiah.⁷ Segala macam fakta selalu dimediasi oleh teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan, dan segala macam konsep adalah konstruksi sosial.

⁵ Mark B. Brown, *Science in Democracy: Expertise, Institutions, and Representation*. Cambridge: MIT Press, 2009, hal. 9.

⁶ J. N. Druckman, "Threats to Science: Politicization, Misinformation, and Inequalities," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 700, no. 1, pp. 8-24, 2022. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00027162221095431> (diakses pada 13 Juni 2024).

⁷ Mark B. Brown, *Op.Cit.*, hal. viii-ix.

Akibatnya, tidak ada yang salah jika seseorang mengonstruksi konsep dan menyimpulkan suatu tafsir fakta lain sebagai fakta alternatif. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, posisi ini dikenal sebagai konstruktivisme sosial. Penalaran ini kemudian bermuara pada relativisme. Relativisme yang dirujuk di sini adalah relativisme putusan (*judgment relativism*), yakni paham yang percaya bahwa segala macam bentuk putusan adalah sama benarnya karena segala macam bentuk fakta selalu termediasi oleh teori atau struktur linguistik tertentu yang tidak mengacu pada realitas.⁸

Kulminasi persoalan ini dapat dilihat sejak tahun 2016 ketika *Oxford Dictionary* hendak menobatkan kata tahunan dari tiga kata kandidat utama, yakni '*post-truth*', '*alt-right*' dan '*Brexiteer*'. Ketiga istilah di atas menyoroti peristiwa politik yang secara sewenang-wenang menggunakan 'kebohongan ilmiah' untuk dijadikan 'fakta' dengan sengaja demi kepentingan politik tertentu. Akibatnya, sepanjang tahun 2015, indeks penggunaan kata *post-truth* melonjak 2000 persen. *Post-truth* merangkum segala corak dan sekaligus menyoroti kedua peristiwa politik dalam '*alt-right*' dan '*Brexiteer*'. Kata *post-truth* akhirnya dinobatkan sebagai kata tahun itu yang menandai kondisi masyarakat global yang pesimis terhadap berbagai pembuktian dan penjelasan ilmiah dalam cengkeraman politik.⁹ Secara implisit, 'politisasi ilmu pengetahuan'

⁸ Bdk. Karlina Supelli, "Ilmu dalam Batas-batas Kemanusiaan: Menolak Penafsiran Relativisme atas Pengetahuan Keilmuan", dalam Xaverius Chandra dan A. Widyawan (Eds.), *Menanggapi Relativisme*, Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2012, hal. 50.

⁹ Dalam Oxford Dictionary, "pasca-kebenaran" didefinisikan "berhubungan dengan, atau menunjukkan keadaan, di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya emosi dan keyakinan pribadi." Kamus Oxford juga menekankan bahwa awalan "pasca" tidak merujuk pada situasi di mana masyarakat telah "melewati" kebenaran dalam arti sementara (seperti

mengimplikasikan reduksi fakta ke dalam nilai, dan sebaliknya ‘politik berbasis ilmu pengetahuan empiris’ cenderung mereduksi nilai ke dalam fakta-fakta empiris.

Fenomena ini erat kaitannya dengan dua posisi filsafat ilmu pengetahuan kontemporer dominan yang saling ber-oposisi pada sumbu vertikal. Mereka berangkat dari semangat emansipatoris¹⁰ yang berbeda dan andaian ontologis yang berbeda, khususnya dalam menelaah manusia. Sumbu vertikal yang penulis soroti adalah bagaimana diskursus pada lintas gagasan, khususnya filsafat ilmu, memengaruhi persoalan pada sumbu horizontal. Persoalan dimuka dapat diselidiki dua posisi filsafat arus utama pada Abad XX.

Pertama Neo-positivisme dari Lingkaran Wina dan yang kedua konstruktivisme sosial yang dalam perkembangannya dipengaruhi post-strukturalisme dan post-modernisme. Pada akhirnya, dua oposisi ini berimplikasi pada ketidakmungkinan emansipasi. Ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan upaya manusia untuk memahami dan menjelaskan fenomena. Untuk menjelaskan sesuatu, manusia perlu tahu hukum sebab-akibat (*causation*) umum yang mendasari berbagai fenomena yang terjadi dengan mempertimbangkan syarat transendental pengetahuan yang ia dapatkan.

dalam "postwar"), tetapi dalam arti bahwa kebenaran tidak lagi relevan. (Bdk. McIntyre, *Post-Truth*, Cambridge: MIT Press, hal. 4).

¹⁰ Sejak zaman modern, Ilmu pengetahuan juga erat kaitannya dengan gagasan emansipasi. Emansipasi secara etimologi latin berarti *emancipatio* yang berarti bebas dari kendali seseorang. Pada zaman modern, emansipasi yang dimaksud adalah emansipasi akal budi manusia dari bentuk penalaran yang tidak memenuhi syarat-syarat transendental sebagai pengetahuan yang sah, secara umum meliputi takhayul dan adat-istiadat, kesadaran palsu, mistifikasi, dan secara khusus metafisika dan dogma teologi. (Bdk. Paola Rebughini, "Framing emancipations," *Journal of Classical Sociology*, vol. 15, no. 3, pp. 270–285, 2015., hal. 270, 281).

Oleh karena itu, tujuan dari ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai upaya memahami hukum sebab-akibat yang melingkupi fenomena keseharian dengan menggunakan akal budi.¹¹

Apa korelasi antara gagasan sebab-akibat dengan emansipasi? Emansipasi¹² akan lebih mudah dipahami melalui negasinya (*via negativa*), yakni sebagai lawan dari pembelengguan-keterbelengguan dan penindasan-ketertindasan manusia. Harapannya, ketika seseorang dapat memahami berbagai penyebab, seseorang dapat memahami sebab-sebab dari emansipasi dan negasinya (kondisi anti-emansipasi) agar emansipasi manusia terwujud. Ketidakmungkinan dan keterbatasan dalam mewujudkan emansipasi dari kedua filsafat ilmu pengetahuan tersebut dapat dianalisis dari logika sebab-akibat internal yang digunakannya dalam positivisme dan konstruktivisme sosial demi mewujudkan emansipasi manusia.

Neo-positivisme berusaha menyasar hukum yang melingkupi (*covering law*) berbagai fenomena dengan menjamin kesahihan pengetahuan melalui syarat transendental Kantian.¹³ Untuk mengungkapnya, positivisme mencari sebab-akibat

¹¹ Christopher Hitchcock, "Causation", dalam Stathis Psillos dan Martin Curd (Eds.), *The Routledge Companion to Philosophy of Science*, London: Routledge, 2008, hal. 319.

¹² Bdk. Paulo Rebughini, *Ibid.*.

¹³ Kant berargumen bahwa semua pengetahuan harus memenuhi dua syarat, yakni: harus berasal dari pengalaman (aspek empiris) dan harus memiliki struktur *a priori* (aspek transendental). Ruang dan waktu adalah aspek *a priori* yang memungkinkan adanya pengalaman empiris. Konsep-konsep metafisika, seperti "jiwa," "dunia," dan "Tuhan," tidak memenuhi dua syarat adanya pengetahuan. Dengan demikian, metafisika bukanlah pengetahuan. Agar dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang sah, metafisika harus memiliki dua syarat tersebut. (Bdk. M. Grier, "Kant's Critique of Metaphysics," dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, E. N. Zalta and U. Nodelman, (Eds.), Fall 2022 ed.,

faktual yang didapatkannya dari observasi peristiwa yang berurutan secara konstan (*constant conjunction*)¹⁴. Untuk menjamin keumuman hasil observasi neo-positivisme juga mempertimbangkan diktum bebas-nilai¹⁵ dan ‘praktik berbasis bukti’.¹⁶ Dalam ranah sosial dan emansipasi, positivisme mencari hukum sosial yang melingkupi. Oleh karena yang menjadi sasaran ada hukum sosial, maka tentu terdapat andaian bahwa manusia, di mana pun ia berada dan bagaimana pun kondisinya, memiliki hal-hal umum yang dimiliki bersama, yakni: rasionalitas. Posisi ini dapat disebut sebagai pewaris ‘fondasionalisme epistemologis’¹⁷ modern pada masa kontemporer. Artinya,

Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022.
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/kant-metaphysics/>. (Diakses pada 16 Juni 2024)).

¹⁴ Konjungsi konstan berasal dari definisi hukum sebab-akibat menurut Hume sebagai berikut: “we may define a cause to be *an object, followed by another, and where all the objects similar to the first, are followed by object similar to the second*” [penekanan asli] (Bdk. David Hume, *Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals*, Oxford: Clarendon Press, 1977, hal. 76) sebagai mana dikutip oleh (Cristopher Hitschcock, *ibid.*)

¹⁵ Untuk menghindari penjelasan yang berangkat dari kepercayaan pribadi dan menjamin keumumannya, Max Weber mengajukan norma netralitas-nilai dalam observasi ilmiah. Bagi, Weber tugas ilmu pengetahuan adalah memahami ‘yang adalah’ (*das sein—what is*) sedangkan, adalah tugas seorang etikawan menjelaskan apa ‘yang seharusnya’ dilakukan (*das sollen—what is ought*). (Bdk. Peter T. Manicas, *A History and Philosophy of the Social Sciences*, Oxford: Basil Blackwell, 1987, hal. 141).

¹⁶ Melangkah lebih jauh dari sekedar netralitas nilai, setelah Perang Dunia II muncul suatu gagasan untuk mendasarkan berbagai penerapan kebijakan berbasis pembuktian ilmiah empiris yang ketat. Pasalnya, sebelum Perang Dunia II, berbagai kebijakan diputuskan berdasarkan pertimbangan kepakaran dari seorang ahli, baik dalam ranah medis, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Akibatnya, kerancuan dan bias manfaat dari suatu kebijakan yang satu dengan yang lain tidak terhindarkan. Prosedur ini pertama kali diterapkan dalam bidang medis sebagai *evidenced based medicine* pada tahun 1946, dan kemudian diadopsi dalam kebijakan pemerintahan yang disebut sebagai *evidenced based policy* (selanjutnya disingkat EBP).¹⁶ Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari suatu kebijakan yang diasumsikan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pendekatan berbasis bukti ini ditujukan untuk mengorespondensikan rasionalitas kepakaran terhadap kenyataan empiris. (Bdk. Jon Baron, "A Brief History of Evidence-Based Policy," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 678, no. 1, July 2018, hal. 41).

¹⁷ Fondasionalisme epistemologis merupakan pandangan yang mencari dasar yang tak tergoyahkan bagi pengetahuan. Ia berpendapat bahwa terdapat keyakinan yang dapat dibenarkan secara langsung, tanpa memerlukan pembenaran dari keyakinan lain. Keyakinan dasar ini berfungsi sebagai fondasi bagi keyakinan lainnya, yang dibenarkan dengan cara diturunkan dari keyakinan dasar tersebut. Contohnya,

dalam neo-positivisme, emansipasi yang dimaksud adalah emansipasi rasionalitas melalui data fakta yang berurutan tentang manusia untuk membebaskan manusia dari subjek pembelenggunya, yakni metafisika dan teologi, sehingga keterbelengguan manusia oleh pengetahuan yang tidak sah dapat dihapuskan. Persoalannya, penindasan-ketertindasan tidak dapat direpresentasikan secara memadai dalam pengamatan fakta-fakta empiris. Seseorang juga digerakkan oleh ‘nilai’ dan bukan sekedar ‘fakta mentah’ (*brute fact*). Persoalan ini mengundang respons dari konstruktivisme sosial yang menekankan aspek sosiologis pada praktik ilmu pengetahuan.

Setiap upaya menelaah manusia dan masyarakat tidak mungkin mengabaikan nilai. Dalam kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan merupakan aktivitas sosial, dan positivisme mengabaikan nilai yang terkandung dalam ‘makna.’¹⁸ Dari kesadaran ini, muncullah suatu pandang, semacam ‘palingan tekstual’ atau ‘palingan hermeneutik’ dalam kritik ilmu sebagai upaya untuk mengembalikan nilai dalam memahami realitas. Posisi-posisi ini dapat dipetakan ke dalam posisi anti-naturalisme dan anti-humanisme—dalam post-strukturalisme/post-modernisme.

perdebatan antara rasionalisme Descartes dan empirisme Hume di mana keduanya berusaha mencari dasar yang tak tergoyahkan bagi pengetahuan melalui keyakinan yang dibenarkan langsung, kebenaran itu dapat berasal dari intuisi rasional atau persepsi indra. (Bdk. "foundationalism," *Encyclopaedia Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/foundationalism> (diakses pada 8 Juli 2024)).

¹⁸ Mark B. Brown, *Op. Cit.*, hal. 9.

Anti-naturalisme adalah posisi epistemologis yang mengakui bahwa tidak terdapat kesebangunan metodologis antara ilmu pengetahuan alam dan sosial.¹⁹ Anti-humanisme adalah posisi yang menekankan bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional layaknya citra manusia yang diklaim oleh para pemikir zaman pencerahan. Kesadaran dalam hal ini dipahami sebagai reifikasi²⁰ struktur.²¹ Apa yang dianggap benar hanyalah ‘konstruksi masyarakat’ atau ‘wacana’ dan tidak berdasar pada rasionalitas yang konstan. Oleh karena itu, dalam kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, posisi ini sering kali dijuluki sebagai kaum konstruktivisme sosial.²²

¹⁹ Tesis dasar dari naturalisme adalah adanya kesatuan metodologis di antara seluruh ilmu pengetahuan. Menurut Bhaskar, sebagaimana dikutip Suryajaya, kubu naturalisme diduduki oleh posisi positivisme, sedangkan kubu anti-naturalisme diduduki oleh posisi hermeneutika. (Bdk. Martin Suryajaya, *Mencari Marxisme: Kumpulan Esai*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016., hal. 89).

²⁰ Dalam konteks filsafat, reifikasi sering kali merujuk pada tindakan yang memperlakukan konsep abstrak, ide, atau proses menjadi seolah-olah memiliki eksistensi fisik yang nyata. Dalam *Cambridge Dictionary* reifikasi dijelaskan sebagai berikut: "the act of changing something abstract (existing as a thought or idea) into something real." (Bdk. "Reification" <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reification> (diakses pada 16 Juni 2014 pk. 21:03)).

²¹ Kesadaran emansipatoris telah ada sejak Comte melalui upaya pengorganisasian 'struktur sosial'. Perbedaananya terletak pada jenis kesadaran yang diajukan untuk mencapai emansipasi. Jika Comte menekankan pada 'kesadaran positif', kaum konstruktivisme sosial menekankan pada kesadaran 'makna' dan 'politis'. Kesadaran anti-positif semacam ini dapat ditelusuri sejak Nietzsche dalam *Use and Abuse of History*. Nietzsche mengatakan: "In the natural sciences, 'the generalizations are the most important things', because 'they contain the laws'. But the historian's generalizations are useless, because 'the residue of truth, after the obscure and insoluble part is removed, is nothing but the commonest knowledge. The smallest range of experience will teach it'", yang menjelaskan sebab-akibat dalam kerangka manusia tidak dapat ditelusuri dari kumpulan fakta. (Bdk. Friedrich Nietzsche, *The Use and Abuse of History*. Indianapolis: Bobbs-Merrill. Hal. 39.) Sebagaimana dikutip dalam Manicas (Bdk. Manicas, *A History and Philosophy of the Social Sciences*. Oxford: Basil Blackwell, 1987, hal. 137.) Dalam konteks kesadaran ilmiah, Foucault dalam *The Order of Things* (1970) berbicara tentang 'kode' peradaban yang menjadi asumsi epistemik dasar yang menentukan apa yang dianggap benar. (Bdk. Peter T. Manicas, *Op. Cit.* 62, 269-270.).

²² Karlina Supelli, "Ilmu dalam Batas-batas Kemanusiaan: Menolak Penafsiran Relativisme atas Pengetahuan Keilmuan", dalam Xaverius Chandra dan A.Widyawan (Eds.), *Menanggapi Relativisme*, Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2012, hal. 23.

Dalam konstruktivisme sosial, yang menjadi subjek pembelenggu adalah wacana, yakni keterbelengguan manusia dalam norma-norma dan kontrol sosial. Konstruktivisme sosial mengatakan bahwa sebab dari berbagai tindakan manusia, termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri, adalah wacana yang sarat-nilai yang berasal dari konstruksi masyarakat. Gerak masyarakat tidak berasal dari hukum sosial yang bersifat umum dan deterministik yang berada di luar masyarakat. Konstruktivisme sosial berusaha menyasar wacana yang melingkupi suatu praktik sosial-budaya dan—tidak terkecuali—dalam ilmu pengetahuan untuk menjelaskan keterbelengguan manusia.²³ Artinya, emansipasi yang dimaksud adalah emansipasi rasionalitas berbasis hak untuk melawan dan menciptakan wacana tandingan. Dalam posisi ini, diktum fondasionalisme epistemologis disangsikan karena dapat dipahami sebagai ‘wacana’ dan bukan berasal dari kebenaran yang niscaya. Oleh karena itu, posisi ini dapat disebut sebagai pasca-fondasionalisme epistemologis. Persoalannya, tidak sembarang wacana berangkat dari konsensus semata karena manusia bukan sekedar makhluk yang hidup berdasar pada konstruksi wacana. Manusia juga hidup berhadapan dengan keniscayaan kimia, fisika, biologi yang bukan sepenuhnya konstruksi sosial.²⁴

²³ Sebagai contoh Rorty dalam *Contingency, Irony and Solidarity* yang mengatakan bahwa segala hal yang manusia pikirkan dan percaya bergantung pada ‘kata-kata’. Segala hal bergantung pada kata yang pilih seseorang dalam kesehariannya. (Bdk. Karlina Supelli, *Op. Cit.*, hal. 50).

²⁴ Untuk memahami ancaman yang dapat ditimbulkan oleh konstruktivisme sosial dan relativisme terhadap kemanusiaan, pemaparan Martha Nussbaum tentang perdebatan dalam konferensi yang diadakan oleh *World Institute for Development Economics Research* dapat memberikan gambaran. Frederique Apffel Marglin dalam konferensi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Inggris yang memperkenalkan vaksin cacar di India. Vaksin itu sangat efektif hingga mengakibatkan kultus Dewi Sittala, yang sebelumnya dipuja untuk mencegah cacar, punah. Marglin melihat ini sebagai contoh pengabaian perbedaan dan pola dominasi pola pikir biner (hidup-mati, sehat-sakit) dalam pemikiran

Dari yang telah dipaparkan, penulis menyoroti dua hal yang menyebabkan ketidakmungkinan emansipasi dalam dua posisi filsafat ilmu pengetahuan tersebut, yakni: andaian ontologis implisit yang berbeda dan reduksi ontologis pada epistemologis. Pertama, andaian ontologis yang berbeda ini menyebabkan perbedaan pemodelan sebab-akibat yang mendasari produksi ilmu pengetahuan di antara keduanya. Posisi pertama fokus pada emansipasi rasionalitas dari bentuk pengetahuan yang tidak sah dari dogma teologis dan metafisika. Yang-ada ialah apa yang tampak sebagai fakta-fakta yang berurutan. Sedangkan, posisi yang terakhir fokus pada emansipasi politik atau emansipasi manusia dari wacana-wacana yang menindas atau apa yang ada ialah makna dalam wacana. Oleh karena keduanya tidak membagi keumuman, maka keduanya tidak dapat dijadikan acuan emansipasi secara umum.²⁵

medis Barat. Nussbaum juga menyoroti praktik inokulasi cacar pada masa kolonial, yang merupakan metode utama pencegahan penyakit tersebut di India sebelum vaksin diperkenalkan. Inokulasi ini dilakukan dengan menggoreskan kulit menggunakan materi yang terinfeksi untuk menimbulkan kekebalan. Meskipun efektif, metode ini juga berisiko tinggi dan menimbulkan kematian. Nussbaum menekankan bagaimana relativisme dan anti-esensialisme yang radikal dapat berujung pada pembelaan praktik-praktik yang menindas dan membahayakan kemanusiaan. Dalam praktik yang menindas, Nussbaum mengambil contoh tabu menstruasi di India yang membatasi kebebasan dan memandang rendah wanita selama masa menstruasi karena menstruasi dipandang dapat mendatangkan hal buruk. Nussbaum mencatat bahwa para intelektual progresif dan feminis kadang tanpa sadar mendukung posisi-posisi opresif dan seksis di bawah panji "anti-esensialisme" mereka. Ini menunjukkan bahwa pandangan-pandangan yang mengutamakan perbedaan budaya tanpa kritik yang memadai dapat memperkuat sistem penindasan yang sudah ada. (Bdk.M. Nussbaum, "Social Justice and Universalism: In Defense of an Aristotelian Account of Human Functioning," *Modern Philology*, vol. 90, no. 2, pp. 66-71, Nov. 1992., hal. 66, 68, 71). Lihat juga artikel Karlina Supelli. (Bdk. Karlina Supeli, *Op. Cit.*, hal. 47). Singkatnya, apakah 'wacana' saja dapat menjelaskan mengapa tidak seorang pun mahasiswa filsafat turun dari lantai 8 dengan melompat keluar jendela?

²⁵ Sebagai suatu pendekatan yang menjanjikan emansipasi, terdapat persoalan yang perlu dipertimbangkan, yaitu *universalia* atau keumuman. *Universalia* mengundang berbagai perdebatan sepanjang sejarah filsafat. Kebenaran, baik dalam pandangan filsafat maupun ilmu pengetahuan, tentu harus bersifat umum. Jika tidak, ia tidak dapat dijadikan acuan umum emansipasi. (Bdk. Jujun Suriasumantri, "Tentang Hakikat Ilmu: Sebuah Pengantar Redaksi", dalam Jujun S. Suriasumantri (Ed.),

Kedua, meskipun berbeda, kedua posisi filsafat itu memahami sebab-akibat sejauh dipahami manusia secara internal (*idealistic causation*). Pandangan ini mengidentikkan apa yang dipahami oleh manusia, baik dari aktualitas peristiwa maupun telaah wacana, sama dengan realitas sedemikian. Akibatnya, kedua posisi tersebut cenderung menganalisis situasi yang tidak emansipatoris sejauh pembelengguan-keterbelengguan dan penindasan-ketertindasan diketahui oleh subjek dalam hukum sebab-akibat Humean atau dalam analisis wacana. Dengan kata lain, emansipasi yang diupayakan oleh keduanya hanya berada dalam ranah kognitif. Jika ‘apa yang dipahami’ salah, dan lebih lagi ‘cara memahami’ salah, maka berbagai penjelasan atas emansipasi akan sia-sia.²⁶

Dalam kontekstualisasi diskursus demokrasi di antara persimpangan dua sumbu ini, pendekatan Realisme Kritis, khususnya metode metakritik, yang dikemukakan Bhaskar menjadi relevan. Persoalan dalam sumbu vertikal adalah bahwa masing-masing posisi tersebut tidak mampu memahami mekanisme sebab-akibat di dunia tanpa keberadaan pengamat (manusia) yang juga ikut mengondisikan berbagai aktivitas rasional manusia.²⁷ Lebih lagi, tanpa adanya justifikasi transendental atas syarat

Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 23)).

²⁶ Bdk. Roy Bhaskar, *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences*, 3rd ed. London dan New York: Routledge, 2005, hal. 8.

²⁷ Oleh karena keduanya memandang mekanisme sebab-akibat sejauh dapat direkonstruksi secara internal dalam subjek, keduanya berciri antroposentris dalam upaya menjelaskan berbagai fenomena hukum. Bhaskar mengatakan “Salah satu aspek dari hal ini adalah pandangan, yang telah saya gambarkan sebagai *epistemic fallacy* [kesalahan epistemik], bahwa pertanyaan-pertanyaan ontologis selalu dapat diulang sebagai pertanyaan epistemologis. Bias antroposentris dan epistemis dari filsafat

kemungkinan ilmu pengetahuan, keduanya mungkin terjatuh ke dalam ‘kesadaran palsu’ yang merasionalisasi kerja kognitif apa pun sebagai ‘ilmu pengetahuan’ tanpa bukti yang memadai secara transendental. Kedua posisi ini disebut Roy Bhaskar *realisme empiris*. Dalam sumbu vertikal Bhaskar mengajukan satu paling metafisika ilmu dan ilmiah. Ia mengawali persoalan ragam posisi ilmu dari analisis modalitas dalam melalui argumen transendental dengan mengajukan apa yang harus benar agar suatu ilmu pengetahuan dimungkinkan. Dari sana, ragam kemungkinan ilmu pengetahuan yang tidak dogmatis dapat diderivasikan. Dalam sumbu horizontal, Bhaskar mengemukakan peran serta ilmuwan sosial untuk mengamati mekanisme laten dalam masyarakat termasuk kesenjangan antara ilmuwan-awam itu sendiri alih-alih mempersoalkannya dalam taraf filsafat. Bhaskar menyediakan kerangka kerja bagaimana persoalan horizontal dapat dikerjakan dari penataan validitas ilmiah secara transendental yang tidak mengisolasi dirinya dari aspek sosial.

Bagi Bhaskar, alih-alih ilmiah, *realisme empiris* bekerja sebagai ideologi yang disebutnya sebagai *irrealisme*. Bhaskar mengkritik, baik positivisme maupun konstruktivisme sosial, karena keduanya gagal memahami realitas yang berada tanpa

klasik menyebabkan pembubaran konsep dunia ontologis, yang kita perlukan untuk membuat proses transitif ilmu pengetahuan dapat dimengerti. Dengan cara ini, dunia, yang seharusnya dipandang sebagai struktur multi-dimensi yang independen dari manusia, menjadi terhimpit ke dalam permukaan datar yang karakteristiknya, seperti dibentuk oleh fakta-fakta atomistik, ditentukan oleh kebutuhan konsep pengetahuan tertentu. Hal ini menyebabkan rentetan masalah dan penjelasan yang mustahil tentang ilmu pengetahuan. Karena mulai sekarang, struktur apa pun, jika diizinkan, harus ditempatkan dalam pikiran manusia atau komunitas ilmiah” (Bdk. Roy Bhaskar, ‘Philosophy and Scientific Realism’, dalam M. Archer et al Eds., *Critical Realism: Essential Readings*, London and New York, Routledge, 1998, hal. 33).

keterlibatan manusia, atau pada posisi ekstrem bahwa fakta-fakta sepenuhnya ilmiah dan bebas dari nilai-nilai tertentu.²⁸ Akibatnya, berbagai upaya yang dilakukan keduanya selalu bermuara pada solipsisme dan menjadi dogma baru.²⁹ Bhaskar mengatakan:

"Dengan demikian, irrealisme berfungsi secara ideologis untuk mengaburkan struktur dan mekanisme yang mengatur fenomena sosial, dengan demikian melegitimasi hubungan kekuasaan yang ada dan menghalangi praktik-praktik transformatif yang bertujuan untuk emansipasi manusia."³⁰

Karena pengaruh ideologi tersebut, seseorang tidak dapat mengungkap penyebab signifikan dari penindasan-ketertindasan dan pembelengguan-keterbelengguan yang absen di bawah deskripsi ideologi tersebut.³¹ Bhaskar menjelaskan pentingnya hubungan emansipasi kognitif dan kondisi di luar kognisi—dan dengan demikian di luar konstruk ideologi—sebagai berikut:

"Emansipasi kognitif secara umum bergantung pada kondisi non-kognitif; dan bahwa emansipasi kognitif diperlukan tetapi tidak cukup untuk emansipasi manusia secara penuh (seperti yang ditunjukkan oleh contoh budak yang mengetahui dengan sangat baik bahwa dia adalah seorang budak tetapi tetap

²⁸ Bdk. Roy Bhaskar, *The Possibility of Naturalism, Op. Cit.*, hal. 173.

²⁹ Martin Suryajaya, *Mencari Marxisme: Kumpulan Esai*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016., hal. 81.

³⁰ Diterjemahkan dari "*Irrealism thus functions ideologically to obscure the structures and mechanisms that govern social phenomena, thereby legitimizing the existing power relations and hindering transformative practices aimed at human emancipation*" (Bdk. Roy Bhaskar, *Scientific Realism and Human Emancipation*, Routledge, 2009, hal. 101).

³¹ Bagi Bhaskar, irrealisme beroperasi sebagai 'kesadaran palsu' sehingga tidak ada seorang pun di bawah pengaruhnya menyadari kesesatan berpikirnya. Lebih lagi, kesadaran palsu itu tidak teramati. Bagi Bhaskar, penalaran (*reasoning*), tidak dapat terkorrespondensikan dengan objek penalaran. Hal tersebut berlaku tidak hanya berlaku bagi ilmu pengetahuan, melainkan juga bagi filsafat sedemikian. Mengatakan pengetahuan seseorang dapat koresponden dengan kenyataan, berarti melanggar syarat transendental kemungkinan ilmu pengetahuan—dan dengan demikian tidak emansipatoris. Hanya dengan mengakui realitas yang tak teramati turut memengaruhi pikiran, seseorang dapat menghalau irrealisme dan juga berbagai ideologi (sebagai kesadaran palsu) lainnya. (Bdk. *Ibid.*).

menjadi budak). Pada kenyataannya, disonansi, bukan pembebasan (atau penjabaran rasional dari strategi emansipatoris), mungkin merupakan hasil langsung dari pencerahan. Dan disonansi semacam itu dapat mengarah pada tindakan praktis-kritis-transformatif-revolusioner atau sebaliknya pada keputusan”³²

Oleh karena itu, emansipasi tidak dapat lagi dipahami sebagai sesuatu yang terjadi semata-mata di dalam pikiran individu, seolah perubahan kesadaran saja sudah cukup untuk membebaskan manusia dari keadaan tertindas—disebutnya sebagai idealist error. Pandangan seperti ini mengabaikan kenyataan bahwa penindasan berakar pada tatanan sosial yang konkret dan historis, dan bukan sekadar kekeliruan berpikir. Demikian pula, emansipasi tidak boleh dipahami sebagai hubungan satu arah, di mana para pendidik, terapis, atau intelektual bertindak sebagai pemberi pencerahan kepada mereka yang dianggap bodoh, sakit, atau tertindas. Cara pandang ini menempatkan subjek sebagai objek pasif, dan melanggengkan ketimpangan dalam proses pendidikan dan transformasi sosial—disebutnya sebagai empirisist error. Dalam kerangka ini, Bhaskar menegaskan bahwa pembebasan menuntut lebih dari sekadar kesadaran; ia juga

³² “*Cognitive emancipation depends in general upon non-cognitive conditions; and that cognitive emancipation is necessary but insufficient for full human emancipation (as shown by the example of the slave who knows only too well that he is a slave but still remains one). In fact dissonance, not liberation (or the rational elaboration of an emancipatory strategy), may be the immediate result of enlightenment. And such dissonance may lead either towards practical-critical-transformative-revolutionary action or alternatively to despair.*” (Bdk. Roy Bhaskar, *Scientific Realism and Human Emancipation*, London: Routledge, 2009, hal 138).

Disonansi yang dimaksud berada dalam ranah psikologis, yang mengacu pada ketidaknyamanan atau ketegangan eksistensial seseorang ketika menghadapi situasi (informasi, peristiwa, *etc.*) yang bertentangan dengan keyakinan, nilai, tindakan, perilaku, dan secara umum struktur sosial yang ada. Istilah ini dekat dengan teori disonansi kognitif Leon Festinger yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung mencari konsistensi dan inkonsistensi di antara kepercayaan dan tindakan mereka. Inkonsistensi di antara keduanya, mengakibatkan tegangan psikologis. (Bdk. “cognitive dissonance,” (Bdk. Encyclopaedia Britannica, <https://www.britannica.com/science/cognitive-dissonance> (diakses pada 8 Juli 2024)).

memerlukan perubahan dalam kondisi material dan sosial yang memungkinkan terbentuknya kesadaran kritis serta kemampuan untuk bertindak. Emansipasi sejati berlangsung dalam relasi yang saling membentuk antara agen dan struktur, antara refleksi (*cognitive emancipation*) dan praxis-transformatif (*non-cognitive conditions*).³³

Secara umum, proyek filsafat ilmu pengetahuan Bhaskar yang dikenal sebagai realisme kritis bertujuan mengembangkan suatu filsafat realisme ilmiah³⁴ yang emansipatoris. Realisme kritis berpedoman pada dua prosedur utama, yakni analisis transendental dan kritik imanen. Kedua metode ini disebutnya sebagai kritik transendental. Melalui dua metode tersebut, Bhaskar membenarkan kembali (*revindicating*) realisme ontologi, relativisme epistemologis, dan rasionalitas putusan. Ketiga posisi ini dirumuskan sebagai trinitas suci realisme kritis. Trinitas suci ini berseberangan dengan oposisi diametralnya dalam berbagai spektrum filsafat, yakni: irrealisme ontologis, abstolutisme epistemologis, dan relativisme putusan. Ketiga

³³ *Ibid.*

³⁴ Realisme ilmiah dapat dipahami dengan jelas dengan membandingkan dengan oposisinya, yakni anti-realisme ilmiah. Samir Okasha menjelaskan bahwa perdebatan realisme dan anti-realisme dalam ranah filsafat ilmu pengetahuan dapat dibandingkan dengan perdebatan dalam metafisika, yakni idealisme versus realisme. Dalam konteks keilmuan, yang menjadi titik tekan perdebatan antara realisme dan anti-realisme ada pada wujud tak tampak dalam berbagai konsep pengetahuan (contoh: atom, DNA, gravitasi, et cetera). Kaum anti-realis mengatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya konstruksi subjektif dan tidak memiliki keterkaitan dengan kenyataan. Sebaliknya, kaum realis mengatakan bahwa memang konsep tersebut hanya penyimbolan bahasa dari konstruksi komunitas ilmuwan yang dapat salah. Namun, terlepas dari salah tidaknya penyimbolan bahasa akademis itu, realitas di luar kesadaran peneliti benar-benar ada. Dalam pengertian realisme ilmiah, ilmu berupaya memahami mekanisme atau wujud-wujud tak nampak yang mendasari berbagai fenomena yang nampak atau aktual. (Bdk. Samir Okasha, *A Very Short Introduction to Philosophy of Science*, Oxford: Oxford University Press, 2016, hal 54-57).

posisi disebut juga sebagai ‘trinitas tidak-suci dari irrealisme’ (*the unholy trinity of irrealism*).³⁵ Bhaskar menolak ketiga oposisi diametral tersebut, yang disebutnya irrealisme, karena tidak mampu memenuhi syarat transendental bagi berlangsungnya ilmu pengetahuan dan tidak memungkinkan adanya emansipasi.

Hal pertama yang dilakukan Bhaskar adalah mengajukan analisis transendental dengan pertanyaan sebagai berikut “Apa syarat-syarat agar sebuah ilmu pengetahuan dimungkinkan?” Jika hal ini tidak dibahas terlebih dahulu, maka siapa pun tidak dapat memilah dengan tepat apa yang mungkin disebut sebagai ilmu pengetahuan dan yang bukan. Kekeliruan dalam penalaran ini disebut Bhaskar dalam ‘analisis transendental’ atas syarat ilmu pengetahuan sebagai kekeliruan epistemik (*epistemic fallacy*) dan kekeliruan ontik (*ontic fallacy*).³⁶ Pertanyaan ini yang dijawab Bhaskar dalam *A Realist Theory of Science* (selanjutnya disingkat RTS) dengan mengajukan posisi ‘realisme transendental’.³⁷ Bhaskar mengungkapkan bahwa syarat ilmu pengetahuan adalah

³⁵ Mervyn Hartwig, “Introduction”, dalam Roy Bhaskar, *Scientific Realism and Human Emancipation*, London; Routledge, 2009, hal xiv.

³⁶ Bagi Bhaskar, persoalan itu—yakni ketidakmungkinan emansipasi—muncul atas andaian ontologi antroposentris *qua* antroporealis yang mendaku bahwa realitas adalah apa yang dipikirkan yang disebutnya sebagai *epistemic fallacy*. Sebaliknya, mengatakan bahwa pengetahuan dapat direduksi ke dalam ilmu pengetahuan fisikal sama dengan mereduksi pengetahuan ke dalam ontologi ilmiah, yang disebut *ontic fallacy*. (Bdk. Roy Bhaskar, “Philosophy and Scientific Realisme”, dalam M. Archer et al (Eds.), *Critical Realism Essential Readings*, London and New York, Routledge, 1998, hal. 33).

³⁷ Istilah ‘transendental’ dalam pengertian Kant secara teknis merujuk pada “semua pengetahuan yang berurusan tidak dengan objek melainkan dengan modus pengetahuan kita sejauh modus pengetahuan ini dimungkinkan *secara apriori*” (Bdk. Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, diterjemahkan oleh Norman Smith, London, 1964, hal. 59) sebagaimana dikutip Martin Suryajaya. (Bdk. Martin Suryajaya, *Materialisme Dialektis: Kajian tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer*, Yogyakarta: Resist Book, 2016, hal. 27).

memiliki dimensi intransitif dan dimensi transitif.³⁸ Pertanyaan dasar ilmu pengetahuan itu kemudian dilanjutkannya pada ranah sosial dalam *The Possibilities of Naturalism* (selanjutnya disingkat PON) dengan mengubah pertanyaan menjadi “sejauh apa metode dalam ilmu alam dapat digunakan pada ilmu humaniora?” Pertanyaan itu dijawabnya dengan posisi ‘naturalisme kritis.’ Dua posisi di atas, yakni realisme transendental dan naturalisme kritis, kemudian digabungkan menjadi realisme kritis.

Di samping realisme transendental dan naturalisme kritis, dalam PON, Bhaskar juga menggagas kritik eksplanatoris (*explanatory critique*). Kritik Eksplanatoris adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap dan mengevaluasi kepercayaan palsu atau masalah sosial yang bertahan melalui penjelasan sebab-akibat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi, serta bagaimana struktur sosial atau kondisi tertentu memungkinkan kepercayaan atau masalah itu terus ada. Kritik Eksplanatoris berfokus pada dua kritik utama, yakni: (i) kritik kognitif yang berfokus pada pengungkapan ketidakbenaran dari suatu kepercayaan yang dipegang secara luas; dan (ii) kritik etis, yang berfokus menilai dan mengevaluasi struktur sosial atau penyebab di balik kepercayaan palsu tersebut. Ketika suatu kepercayaan yang dipegang secara luas terbukti salah dan struktur sosial tertentu

³⁸ Dari realisme transendental tersebut, ia merumuskan bahwa ada dua syarat bagi adanya ilmu pengetahuan, yakni DT yakni ilmu pengetahuan dapat diproduksi melalui dialektika para ilmuwan sepanjang sejarah, dan DI yakni sebagai benda yang keberadaannya independen di luar pengetahuan manusia sepanjang sejarah. Dengan demikian DT mewakili epistemologi, dan DI mewakili ontologi. (Bdk. Roy Bhaskar, *A Realist Theory of Science*, New York: Routledge, 2008, hal. xxix).

berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan tersebut, evaluasi etis negatif terhadap struktur tersebut dapat dilakukan. Selain mengevaluasi struktur yang mempertahankan kepercayaan palsu secara negatif, Kritik Eksplanatoris juga mengarahkan pada evaluasi positif terhadap tindakan yang bertujuan menghilangkan struktur tersebut. Jika teori yang mapan mengonfirmasi bahwa aktivitas tertentu dapat membantu menggeser atau menggantikan struktur tersebut, maka tindakan itu dianggap positif secara etis.³⁹

Dari pemaparan ringkas di atas, dapat dipahami bahwa Kritik Eksplanatoris membenarkan transmisi inferensi fakta ke nilai. Hal itu bersandar pada prinsip “apa yang benar adalah baik, *ceteris paribus*.” Bagi Bhaskar, kebenaran adalah sesuatu yang baik, *ceteris paribus*, bukan hanya syarat untuk diskursus moral melainkan syarat untuk segala bentuk diskursus. Karena itu komitmen pada kebenaran dan konsistensinya sangatlah penting dalam diskursus faktual dan diskursus nilai.⁴⁰

³⁹ Misalnya, terdapat kepercayaan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kemalasan individu, yang sering digunakan untuk menyalahkan individu atas kemiskinan mereka. Namun, struktur sosial seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, diskriminasi dalam pasar tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil adalah penyebab kemiskinan. Melalui kritik eksplanatoris, dapat menunjukkan bahwa kepercayaan ini salah (kritik kognitif) dan bahwa struktur sosial yang tidak adil adalah penyebab sebenarnya (kritik etis). Data empiris menunjukkan bahwa orang miskin bekerja lebih lama dengan upah lebih rendah, sehingga kemiskinan disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, bukan kemalasan. Selanjutnya, evaluasi secara positif atas tindakan yang mengubah struktur sosial ini dapat dilancarkan, seperti kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas, program pelatihan keterampilan kerja, dan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan. (Bdk. Mervyn Hartwig (Ed.), *Dictionary of Critical Realism*, Abingdon, London: Routledge, 2007, hal. 197); (Bdk. Andrew Collier, *Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy*, London: Verso, 1994, hal. 171-172, 174).

⁴⁰ Bdk. Roy Bhaskar, *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences*, 3rd ed. London dan New York: Routledge, 2005, hal. 69.

Kebaruan yang ditawarkan SRHE adalah metode metakritik dan dimensi metakritik. Berbeda dari Ilmu pengetahuan, bagi Bhaskar, filsafat adalah disiplin tatanan kedua. Ia tidak bertemu langsung dengan Dimensi Intransitif, namun ia menjamin syarat-syarat ilmu. Dengan kata lain, objek telaah filsafat adalah ilmu itu dan dirinya sendiri. Pada daya analisis swa-telaah itu (filsafat atas filsafat) di perlukan syarat ketiga yakni dimensi metakritik. Jika tidak ada Dimensi Metakritik (selanjutnya disingkat MD), maka filsafat sebagai kajian telaah atas ‘ilmu’ dan ‘filsafat ilmu’ yang emansipatoris tidak dapat berjalan.⁴¹ Dari sana, suatu analisis atas berbagai proses diskursus manusia yang emansipatoris dapat dimungkinkan, yang ia sebut sebagai metakritik. Filsafat menjalankan gagasan metakritik yang menjamin pembenaran transcendental dari berbagai kritik atas ilmu dan dirinya sendiri (filsafat atas ilmu). Suatu metode analisis transcendental yang juga harus mengakui sesuatu di luarnya, di luar filsafat ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu.⁴²

Motivasi awal dari metakritik, sebagaimana dijelaskan Bhaskar dalam *Scientific Realism and Human Emancipation*, adalah untuk menelusuri bagaimana suatu sistem filsafat dapat beroperasi sebagai ideologi, terutama dalam domain ilmu

⁴¹ Roy Bhaskar, *Scientific Realism and Human Emancipation*, *Op. Cit.*, hal. 62.

⁴² Dalam *A Realist Theory of Science*, Bhaskar mengajukan analisis transcendental pada syarat kemungkinan ilmu pengetahuan. Dalam SRHE, Bhaskar mengajukan analisis transcendental ganda di mana metakritik beropreasi, yakni dapat dipahami dari pertanyaan “apa syarat suatu filsafat (analisis transcendental) dapat dilancarkan”, sehingga dapat dipilah mana analisis filosofis yang ilmiah dan yang ideologis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi filsafat Bhaskar, khususnya metakritik, berada dalam posisi metafilosofis. (Bdk Mervyn Hartwig, “Introduction”, dalam Roy Bhaskar, *Op. Cit.*, hal xvi).

pengetahuan dan praksis sosial. Positivisme menjadi fokus utama bukan semata karena pengaruh historisnya, tetapi juga karena kritik yang tidak tuntas atasnya.⁴³ Dalam tahap metakritik postivisme disebut Bhaskar sebagai ‘Sistem P’, artinya postivisme sebagai sistem, bukan mazhab. Dengan kata lain, meski telah dikritik secara konseptual, positivisme sebagai Sistem P tetap hadir secara laten dalam filsafat ilmu karena ia tertanam dalam praktik dan struktur keilmuan. Oleh karena itu, peran metakritik fokus pada upaya penelusuran kondisi-kondisi sosial-historis, yang menopang dan mereproduksi Sistem P, termasuk melalui penyamaran terhadap syarat-syarat ontologis yang secara formal disangkal tetapi secara praktis dibutuhkan.⁴⁴

Metakritik, dengan demikian, bertujuan untuk mengungkap kondisi-kondisi sosial riil yang memungkinkan kelangsungan bentuk-bentuk penyimpangan representasi terhadap realitas sebagaimana diperantarai oleh Sistem P, termasuk syarat-syarat sosial dan kognitif yang menjelaskan bagaimana sistem pemikiran tersebut dapat *dipertahankan* dalam bentuknya yang asli atau *dikonversi* ke dalam bentuk-bentuk baru yang tetap menjalankan fungsi ideologis yang serupa.⁴⁵ Fokus utamanya adalah pada *invarian-invarian kognitif* yang memungkinkan reproduksi sistem tersebut—yakni struktur-struktur pemikiran yang secara kategoris keliru. meskipun ia juga mengakui bahwa prasyarat non-kognitif historis dan material (*non-cognitive condition*), seperti

⁴³ *Op. Cit* , Roy Bhaskar, *Scientific Realism and Human Emancipation*, hal. 151.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 156.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 166.

sistem produksi manufaktur dalam kapitalisme awal, berperan besar dalam pembentukan positivisme modern.⁴⁶

Secara umum metakritik bertujuan untuk mengidentifikasi absensi yang signifikan dalam pemikiran, berusaha mengungkap apa yang tidak dapat diartikulasikan atau dilakukan dalam sistem bahasa atau sistem konseptual tertentu mengenai apa yang telah dikatakan, dilakukan, diketahui, tersirat, atau diandaikan dalam dan/atau melalui sistem tersebut. Metakritik juga berusaha memahami apa yang tidak dapat diungkapkan dalam skema pemikiran yang terkait dengan praktik-praktik dalam skema itu sendiri. Bhaskar menekankan bahwa perlu “dibedakan antara apa yang secara niscaya tidak dapat diungkapkan dalam skema tersebut dengan apa yang mungkin hanya tidak diketahui oleh pelaku yang menggunakannya, atau yang hanya diketahui secara implisit.” Bhaskar juga mengatakan bahwa ‘metakritik’ dapat dilihat sebagai jenis, komponen, atau bahkan pendahulu dari kritik eksplanatoris secara umum.⁴⁷

Terdapat dua bentuk metakritik, yakni: metakritik₁ (yang berada di antara Dimensi Intransitif dan Dimensi Transitif) dan metakritik₂ (yang berada dalam Dimensi

⁴⁶ Kendati metakritik tidak ditujukan untuk menguliti kondisi non-kognitif, Bhaskar memberikan catatan tentang bagaimana Sistem P muncul dalam ilmu pengetahuan modern. kondisi historis-material sebagai prasyarat ideologis bagi dominasi bentuk pengetahuan positivistik. Dalam konteks ini, Bhaskar mengacu pada argumen bahwa rendahnya tingkat perkembangan kekuatan produktif dalam ilmu (yakni rendahnya kapasitas teknologis dan metodologis untuk menjelajahi sistem terbuka dan kausalitas kompleks), bersama dengan struktur ekonomi berbasis manufaktur dan pabrik yang mendominasi relasi manusia dengan alam (yang mengandaikan pengendalian sistem tertutup demi kepentingan modal), merupakan kondisi material utama bagi kemunculan dan efektivitas ideologi positivisme. (Bdk. *Ibid.*)

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 17.

Metakritik). Metakritik₁ adalah kritik imanen yang berfokus mengidentifikasi hal yang luput dalam penalaran sehubungan dengan kenyataan independen. Metakritik₂ memperluas dan mendasari gagasan kritik eksplanatoris yang telah dijelaskan dalam PON. Perluasan ini disebut sebagai totalisasi kritik eksplanatoris (*totalising explanatory critique*) atau kritik yang menjelaskan secara total.⁴⁸ Kedua bentuk metakritik ini menjadi metode kritik dasar yang menjelaskan berbagai sebab-sebab penindasan yang absen dalam kerangka internal subjek, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun filsafat ilmu pengetahuan.

Dalam SRHE, metakritik juga digunakan Bhaskar untuk memberikan justifikasi metafilosofis atas realisme kritis (realisme transendental dan naturalisme kritis) sebagai ilmu pengetahuan dan membedah berbagai ideologi irrealis dalam filsafat ilmu pengetahuan lain.⁴⁹ Melalui metakritik, Kritik Eksplanatoris dapat mengkritik sekaligus menjelaskan kemunculan berbagai kondisi anti-emansipatoris hingga pada aras ideologi dalam ilmu pengetahuan yang secara implisit mendasari berbagai penjelasan ilmiah dan penjelasan filosofis. Dari sana, realisme ilmiah dimungkinkan sebagai sarana mencapai emansipasi berkelanjutan—*cognitive emancipation* yang bertumpu pada *non-cognitive conditions* (kondisi dalam domain intransitif) dalam serangkaian kondisi sosio-historis dan material.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 18.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 101.

⁵⁰ (Bdk. *Ibid.*, hal 137)

Ide utama dalam karya ilmiah ini adalah untuk memahami dan merefleksikan metode berfilsafat demi terwujudnya emansipasi manusia, sebagaimana dirumuskan Roy Bhaskar melalui metode yang ia sebut metakritik, dalam kerangka filsafat ilmu pengetahuan secara umum. Sebagaimana telah dipaparkan, agar emansipasi dapat dimungkinkan, seseorang harus mampu mengenali kondisi-kondisi yang mendasarinya, baik yang bersifat kognitif (yakni berkaitan dengan kesadaran, pengetahuan, dan struktur epistemik), maupun non-kognitif (yaitu struktur sosial-material yang menopang atau menghambat berkembangnya kesadaran dan tindakan emansipatoris). Untuk memahami secara kritis mekanisme yang melanggengkan kondisi anti-emansipasi, seseorang terlebih dahulu harus terbebas dari ideologi dalam ilmu pengetahuan—yaitu struktur pemikiran yang menyamarkan syarat-syarat ontologis dan sosial dari realitas. Apa yang ditawarkan Bhaskar melalui metakritik adalah pengungkapan kondisi kausal yang bersifat material dan struktural, yang sering kali tidak termuat dalam kerangka kognitif subjek. Kondisi-kondisi inilah yang menjelaskan bagaimana penindasan dan keterbelengguan tetap berlangsung bahkan ketika tidak disadari oleh pelaku sosial. Lebih jauh, metakritik juga dapat digunakan untuk merumuskan kriteria formal ideologi, sehingga memungkinkan kita mengidentifikasi dan menolak bentuk-bentuk pengetahuan yang secara fungsional bersifat ideologis, meskipun tampil dalam bentuk teoritis atau ilmiah. Dengan demikian, metakritik bukan hanya berfungsi sebagai alat kritik epistemologis, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan proyek ilmu pengetahuan yang

emansipatoris, yaitu ilmu yang tidak hanya menjelaskan dunia, tetapi juga berperan dalam transformasinya ke arah pembebasan.

Secara longgar, motivasi ini juga dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi pembacaan *common good* dari sudut filsafat naturalis-kritis—yakni, menjadikannya objek yang dapat dikaji bersamaan dengan elaborasi ilmiah tanpa harus kehilangan muatan nilai dan aspirasi etisnya. Dalam konteks ini, *common good* difokuskan pada topik studi *resilience* sebagai titik masuk. Dengan demikian, *kebaikan bersama* tidak lagi dipahami sebagai ideal abstrak-moral, melainkan sebagai kapasitas kolektif masyarakat demokratis untuk bertahan, beradaptasi, dan mentransformasi diri dalam menghadapi *gangguan (disturbance)*, baik yang bersifat internal (seperti konflik nilai dan disinformasi) maupun eksternal (seperti tekanan ekonomi, perubahan iklim, atau disrupsi global). Dalam upayanya dalam memahami duduk persoalan ketahanan, penelitian ini terbatas pada aras filsafat ilmu dan tidak pada analisis sistem sebagai kajian ilmu.

Salah satu pengertian *resilience* dalam ragam pengertian lintas disiplin adalah suatu kapasitas sistem untuk kembali pada *steady-state* nya pasca mengalami gangguan (*disturbance*). Di titik ini-lah, kritik ideologi ilmu Bhaskar menyumbang gagasan penting. Dalam analisis metakritiknya, Ideologi adalah bentuk suatu Sistem untuk mempertahankan kedudukannya melalui penyamaran dalam bentuk yang sedemikian baru. Salah satu sebab ini adalah tidak dilakukannya kritik tuntas (*complete critique*) atas suatu Sistem. Adapun yang dimaksud kritik tuntas adalah 3 kritik elementer yang

Bhaskar gunakan dalam Realisme Kritis, yakni kritik transendental (kritik syarat-syarat kemungkinan), kritik imanen (kritik internal), dan kritik ekplanatoris (kritik yang menjelaskan tentang mengapa suatu pemikiran sosial salah, dan mengapa ia bertahan). Dengan daya jelajah dan penjelasannya yang mencakup dua rumbu itu,. Bhaskar dapat membantu mengevaluasi stagnansi yang terjebak dalam kebuntuan dalam untuk menyingkap kondisi-kondisi ontologis dan epistemologis yang memungkinkan emansipasi.

Dalam konteks *resilience* demokrasi dimuka, Bhaskar dapat membuka jalan agar *resilience* ditelaah secara ilmiah dengan tetap bersimpati pada ide *bonum commune* dan emansipasi manusia bukan pada segelintir kelompok atau kepercayaan yang keliru semata (ideologi). Misalnya, dalam konteks Indonesia, relevansi kajian ini menjadi sangat nyata ketika konsep *bonum commune* dan *resilience* dihadapkan pada praktik pemerintahan yang secara historis membingkai ketahanan sebagai dalih untuk membenarkan tindakan-tindakan anti-demokratis. Dengan demikian, *bonum commune* dapat dianalisis secara ilmiah sebagai gejala sistemik yang memiliki kausalitas, dapat diuji keabsahannya, dan berfungsi sebagai alat intervensi normatif dalam demokrasi yang kompleks—termasuk di Indonesia, di mana ketahanan publik harus dibebaskan dari watak hegemonik dan ditransformasikan sebagai kemampuan reflektif kolektif untuk menjaga ruang bersama secara adil dan adaptif.

Dalam kerangka tersebut, metakritik berfungsi sebagai prosedur reflektif yang memungkinkan proses naturalisasi *bonum commune* berjalan secara kritis dan tidak naif. Alih-alih mereduksi nilai menjadi fakta empiris, metakritik menyingkap dan

menguji syarat-syarat ontologis, epistemologis, dan metodologis yang memungkinkan nilai tersebut hadir sebagai *fenomena empiris sekaligus normatif*. Ini penting karena nilai tidak otomatis ilmiah hanya karena ia penting secara moral. Dengan metakritik, *bonum commune* dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis dan ilmiah, tanpa kehilangan kandungan etisnya. Ia bukan lagi semata-mata slogan moral, tetapi menjadi objek yang dapat diuji secara ilmiah sekaligus filosofis terhadap kondisi realitas sosial yang menghambat atau menunjang aktualisasinya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjadikan *bonum commune* dan *resilience* sebagai objek pengetahuan yang terbuka terhadap kritik dan revisi ilmiah, sambil tetap mempertahankan signifikansinya dalam horizon demokrasi emansipatoris. Maka dari itu, analisis atas demokrasi dan kebijakan publik dapat melampaui dikotomi semu antara ‘apa yang seharusnya’ dan ‘apa yang dapat dijelaskan’, dan membuka jalan bagi pendekatan ilmiah yang tetap bernilai, kritis, dan transformatif.

1.2.Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, skripsi ini merumuskan masalah sebagai berikut: "Apa itu metode metakritik dalam realisme kritis Roy Bhaskar terhadap filsafat ilmu pengetahuan untuk emansipasi manusia berdasarkan buku *Scientific Realism and Human Emancipation*?". Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menguraikannya ke dalam beberapa pertanyaan turunan, yang antara lain:

- 1) Apa itu metode?

- 2) Apa itu filsafat, ilmu, dan filsafat ilmu pengetahuan berdasarkan objek kajiannya dan implikasinya batasan suatu metode?
- 3) Apa itu realisme kritis?
- 4) Apa itu metode metakritik dalam realisme kritis dan relasinya dengan filsafat ilmu pengetahuan?
- 5) Apa itu emansipasi manusia menurut Roy Bhaskar?
- 6) Bagaimana metode metakritik menjadi metode emansipatoris bagi filsafat ilmu pengetahuan menurut Roy Bhaskar?

1.3. Metode Penelitian

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan adalah buku *Scientific Realism and Human Emancipation* karya Roy Bhaskar. Selain itu, beberapa sumber pendukung akan digunakan untuk memperkaya analisis, antara lain: *A Realist Theory of Science* dan *The Possibility of Naturalism* oleh Roy Bhaskar; *Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy* oleh Andrew Collier; serta *A Realist Philosophy of Social Science* dan *History and Philosophy of the Social Sciences* oleh Peter T. Manicas.

b. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode hermeneutika yang dipaparkan oleh Anton Bekker. Hermeneutika, sebagai metode untuk memahami teks, terdiri dari beberapa elemen

penting yang akan diuraikan dalam penelitian ini, yaitu: interpretasi, koherensi internal konsep-konsep pemikiran, dan historisitas.⁵¹

Interpretasi adalah langkah awal dalam metode hermeneutika yang digunakan oleh penulis. Dalam konteks penelitian ilmiah, interpretasi adalah proses memahami dan menafsirkan fenomena yang dianggap sebagai fakta atau data. Menurut Dilthey, interpretasi adalah upaya untuk mencapai pemahaman atau *verstehen* yang utuh. Penulis akan mengkaji gagasan-gagasan Roy Bhaskar dalam "*Scientific Realism and Human Emancipation*" sebagai data utama, disertai sumber lain untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang metode metakritik.⁵²

Koherensi internal antara konsep-konsep pemikiran adalah elemen penting kedua dalam hermeneutika.⁵³ Penelitian ini akan menelaah bagaimana unsur-unsur dalam pemikiran Bhaskar saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistematis. Koherensi internal ini harus dipahami sebagai struktur yang saling terkait, di mana setiap elemen berhubungan dengan elemen lainnya, sehingga membentuk pemahaman yang utuh atas sistem filsafat Bhaskar. Walaupun di dalam relasi antar aparatus konseptual Bhaskar mungkin ditemukan ketidakkonsistenan, temuan itu tetaplah penting dalam memahami metode metakritik Bhaskar dalam totalitas sistem

⁵¹ Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, Bab 3, hal. 41-55.

⁵² *Ibid.*, hal. 42.

⁵³ *Ibid.*, hal. 45.

filsafatnya. Dengan demikian, pemahaman hakikat suatu gagasan dapat dilihat dengan jelas dari susunan struktural dan internalnya.

Historisitas adalah elemen ketiga yang sangat penting dalam hermeneutika menurut Dilthey dan Schleiermacher. Menurut Dilthey dan Schleiermacher, pembaca harus berusaha menyelami zaman di masa pengarang suatu teks tersebut hidup.⁵⁴ Menurut Dilthey, untuk menangkap maksud penulis secara utuh melalui *verstehen*, seseorang harus menyelami dan menempatkan diri dalam konteks historis penulis saat ia mengonstruksikan gagasannya. Ini berarti bahwa memahami sejarah hidup, konteks sosial, dan pergulatan penulis dengan lingkungannya adalah esensial untuk memahami gagasannya secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji historisitas Roy Bhaskar dan bagaimana konteks sejarah dan kehidupannya mempengaruhi pemikirannya. Dengan demikian, pembacaan sejarah menjadi alat penting untuk mengidealisasikan gambaran yang mendekati lingkungan semasa Bhaskar mengembangkan metode metakritiknya.

Dengan menekankan elemen-elemen interpretasi, relasi internal konsep-konsep pemikiran, dan historisitas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang metode metakritik Bhaskar terhadap filsafat ilmu pengetahuan. Metode hermeneutika yang digunakan akan membantu penulis mencapai pemahaman

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 48.

yang komprehensif dan koheren tentang pemikiran Bhaskar, sesuai dengan pendekatan hermeneutika yang diuraikan oleh Bekker.

1.4. Tujuan Penelitian

Skripsi ini berjudul "Metode Metakritik dalam Realisme Kritis menurut Roy Bhaskar berdasarkan *Scientific Realism and Human Emancipation*" dan memiliki tiga tujuan utama, yakni:

1. Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Program Studi Filsafat di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Memahami dan menganalisis pemikiran Roy Bhaskar tentang metode metakritik dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan yang emansipatoris, seperti yang dijelaskan dalam buku *Scientific Realism and Human Emancipation*.
3. Mengelaborasi relevansi dan aplikasi metode metakritik dalam telaah filosofis atas praktik dan aktivitas ilmiah yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial, sebagai contoh dalam kebijakan publik, demi pewujudan emansipasi manusia.

1.5. Tinjauan Pustaka

a. Roy Bhaskar, *Scientific Realism and Human Emancipation*, London: Routledge, 2009

Buku ini—*Scientific Realism and Human Emancipation* (2009) karya Roy Bhaskar—adalah sumber primer dalam penelitian ini. Karya ini merupakan salah satu karya penting dalam realisme kritis yang melanjutkan pemikiran dari karya-karya sebelumnya seperti *A Realist Theory of Science* dan *The Possibility of Naturalism*. Buku ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami ilmu pengetahuan sebagai praktik yang eksplanatoris dan emansipatoris. Terdiri dari tiga bagian utama, buku ini mengkritik pandangan kontemporer tentang ilmu pengetahuan, memperkenalkan realisme transendental, dan mengaplikasikan metakritik terhadap positivisme.

Bagian pertama buku ini mengkritik keterbatasan positivisme dan memperkenalkan realisme transendental, yang mengakui bahwa objek-objek penyelidikan ilmiah ada dan bertindak secara independen dari persepsi manusia. Bagian kedua berfokus pada ilmu sosial dan memperkenalkan naturalisme kritis, menekankan interaksi antara alam dan masyarakat melalui model transformasional aktivitas sosial. Bagian ketiga mengaplikasikan metakritik pada positivisme, mengungkap struktur sosial dan ideologi yang mendasari, serta menyoroti potensi emansipatoris ilmu sosial.

b. Roy Bhaskar, *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences*, 3rd ed, London and New York: Routledge, 2005

The Possibility of Naturalism (1979) adalah karya seminal Roy Bhaskar yang menjadi dasar bagi gerakan realisme kritis. Buku ini memperkenalkan naturalisme kritis sebagai alternatif terhadap positivisme dan post-modernisme. Bhaskar mengkritik positivisme yang mengandalkan regularitas empiris dan hermeneutika yang terlalu menekankan pada pemahaman interpretatif. Ia mengusulkan pendekatan yang mengakui perbedaan signifikan antara ilmu alam dan ilmu sosial, serta memperkenalkan model transformasional aktivitas sosial.

Buku ini menekankan pentingnya ontologi dalam memahami ilmu pengetahuan, mengkritik pandangan reduksionis dan menegaskan bahwa ada struktur kausal yang mendasari fenomena, yang harus diakui oleh filsafat ilmu pengetahuan. Buku ini juga menjelaskan konsep realisme transendental dan dampaknya terhadap penjelasan ilmiah dan sosial.

c. Roy Bhaskar, *A Realist Theory of Science* , New York: Routledge, 2008

A Realist Theory of Science, pertama kali diterbitkan pada 1975, memperkenalkan pendekatan realisme transendental yang menjadi dasar realisme kritis. Bhaskar mengkritik pandangan positivisme yang melihat ilmu pengetahuan sebagai kumpulan fakta yang dihasilkan melalui pengamatan dan eksperimen. Ia menegaskan bahwa hukum kausal memiliki dasar ontologis yang lebih dalam daripada

sekadar pengamatan empiris, dan bahwa ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan sistem terbuka dan struktur kausal.

d. Andrew Collier, *Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy*, London: Verso, 1994

Collier dalam bukunya "Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy" memberikan pengantar yang mudah dipahami mengenai ide-ide kompleks Roy Bhaskar, terutama dalam filsafat ilmu dan teori sosial. Collier menguraikan kerangka teoritis Bhaskar dengan jelas, membuatnya lebih dapat diakses bagi pembaca baru. Buku ini terbagi menjadi dua bagian utama: pertama, yang membahas landasan realisme transendental Bhaskar, termasuk ontologi kedalaman dan kritik terhadap empirisme dan idealisme; dan kedua, yang memperluas ide-ide Bhaskar ke ranah ilmu sosial, menunjukkan penerapan praktis dan kegunaan filosofisnya. Collier tidak hanya menyajikan ide-ide Bhaskar secara komprehensif tetapi juga mengajak pembaca untuk refleksi kritis, menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam pemikiran Bhaskar dan menyarankan arah untuk penyelidikan lebih lanjut.

e. Peter T. Manicas, *A History and Philosophy of the Social Sciences*, Oxford: Basil Blackwell, 1987

A History and Philosophy of the Social Sciences oleh Peter T. Manicas adalah karya komprehensif yang menggabungkan sejarah perkembangan ilmu sosial dengan analisis filosofis mendalam. Manicas menelusuri akar-akar sejarah ilmu sosial dan menunjukkan bagaimana disiplin ini berkembang dalam dialog dengan perubahan

sosial, politik, dan ekonomi. Buku ini menawarkan perspektif historis yang luas dan kritik tajam terhadap berbagai pendekatan dan teori dalam ilmu sosial.

1.6. Skematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Bab I Pendahuluan akan menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Skematika Penulisan. Selanjutnya, pada Bab II Perjalanan Intelektual Roy Bhaskar dan Tinjauan Umum Realisme Kritis, akan diuraikan secara sekilas riwayat hidup Bhaskar, tokoh-tokoh pemikir yang memengaruhi pemikirannya, serta karya-karya utama pemikirannya, serta beberapa kerangka dan gagasan pokok pemikiran Bhaskar, khususnya tentang ontologi dan filsafat ilmu pengetahuan. Dua bab awal ini diharapkan menjadi orientasi awal untuk memahami secara keseluruhan gagasan-gagasan pokok dalam skripsi ini.

Setelah itu, Bab III dengan judul Metode Metakritik dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan Emansipatoris Roy Bhaskar akan menguraikan secara rinci metode metakritik Roy Bhaskar. Gagasan ini bertumpu pada dasar metode metakritik, yakni argumen transendental dan kritik elementer dari praxis-ontologis. Setelah itu, penulis akan menguraikan dalam Bab III ini kritik atas ilmu pengetahuan dan kritik eksplanatoris yang menjadi syarat bagi emansipasi. Dari tiga uraian dasar itu, penulis menguraikan gagasan Bhaskar tentang metakritik sebagai kritik atas ideologi dalam filsafat ilmu pengetahuan.

Bab IV Penutup akan memuat tinjauan kritis yang disampaikan oleh penulis terhadap pemikiran Bhaskar tentang metakritik dalam filsafat ilmu pengetahuan. Penulis juga akan menyampaikan beberapa sumbangan penting pemikiran Bhaskar dalam telaah filosofis yang relevan dan kontekstual. Bab IV kemudian akan ditutup dengan kesimpulan sekaligus saran untuk pendalaman tema-tema lain yang perlu dan penting dari pemikiran Bhaskar tentang metakritik dalam filsafat ilmu pengetahuan